



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI



**PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 13 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PANTI SOSIAL BINA ANAK, WANITA DAN EKS PSIKOTIK  
" HARAPAN MULYA"  
PADA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI JAMBI**

**BIRO ORGANISASI  
SETDA PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2018**





## GUBERNUR JAMBI

### PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 13 TAHUN 2018

#### TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PANTI SOSIAL BINA ANAK, WANITA DAN EKS PSIKOTIK

“HARAPAN MULYA”

PADA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL

PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar/anak putus sekolah tidak mampu, eks wanita penyandang masalah kesejahteraan sosial dan eks psikotik agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan dapat hidup secara normatif di dalam masyarakat, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Bina Anak, Wanita dan Eks Psikotik “Harapan Mulya” pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Bina Anak, Wanita dan Eks Psikotik “Harapan Mulya” pada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);



2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 44);

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL BINA ANAK, WANITA DAN EKS PSIKOTIK "HARAPAN MULYA" PADA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
7. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Bina Anak, Wanita dan Eks Psikotik "Harapan Mulya" yang selanjutnya disebut UPTD PSBAWEP Harapan Mulya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Bina Anak, Wanita dan Eks Psikotik "Harapan Mulya" pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.



13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

##### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD PSBAWEP Harapan Mulya pada dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

##### Pasal 3

- (1) UPTD PSBAWEP Harapan Mulya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Susunan organisasi UPTD PSBAWEP Harapan Mulya terdiri dari:
  - a. kepala UPTD PSBAWEP Harapan Mulya;
  - b. sub bagian Tata Usaha;
  - c. seksi Program dan Advokasi Sosial;
  - d. seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
  - f. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD PSBAWEP Harapan Mulya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Ketiga

#### Tugas dan Fungsi

##### Paragraf 1

#### UPTD PSBAWEP Harapan Mulya

##### Pasal 4

UPTD PSBAWEP Harapan Mulya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang kesejahteraan sosial bagi anak terlantar/anak putus sekolah tidak mampu, eks wanita Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan eks psikotik.

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD menyelenggarakan fungsi:



- a. pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan fisik dan kesehatan serta bimbingan keterampilan bagi anak terlantar/anak putus sekolah tidak mampu, wanita penyandang PMKS dan eks psikotik;
- b. pelaksanaan pemberian perlindungan sosial, advokasi sosial, informasi dan rujukan serta pemulangan dan Binjut bagi anak terlantar/anak putus sekolah tidak mampu, wanita penyandang PMKS dan eks psikotik; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

#### Paragraf 2

#### Kepala UPTD PSBAWEP Harapan Mulya

#### Pasal 6

- (1) UPTD PSBAWEP Harapan Mulya dipimpin oleh seorang kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD PSBAWEP Harapan Mulya mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar/anak putus sekolah tidak mampu, wanita Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan eks psikotik.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD PSBAWEP Harapan Mulya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan;
- b. pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi diagnosa sosial dan perawatan;
- c. pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan fisik dan kesehatan, serta bimbingan keterampilan;
- d. pelaksanaan pemberian perlindungan sosial, advokasi sosial, informasi dan rujukan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 3

#### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PSBAWEP Harapan Mulya.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan aset UPTD.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:



- a. penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD PSBAWEP Harapan Mulya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
- c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- d. pengelolaan kepegawaian;
- e. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD PSBAWEP Harapan Mulya;
- g. penyusunan standar operasional prosedur UPTD PSBAWEP Harapan Mulya;
- h. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD PSBAWEP Harapan Mulya;
- i. pelaksanaan penyusunan laporan UPTD PSBAWEP Harapan Mulya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

#### Seksi Program dan Advokasi Sosial

#### Pasal 10

- (1) Seksi Program dan Advokasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PSBAWEP Harapan Mulya.
- (2) Seksi Program dan Advokasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan penyusunan program dan Advokasi sosial.

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Seksi Program dan Advokasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penjangkauan awal dan penerimaanklien yang meliputi identifikasi awal dan observasi awal;
- b. penyusunan program pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- c. pemberian Informasi dan sosialisasi pelayanan;
- d. pemberian bantuan perlindungan sosial dan advokasi sosial
- e. penyusunan bahan-bahan pelaksanaan kerjasama;
- f. pelaksanaan pengkajian dan penyiapan bahan standarisasi program pelayanan rehabilitasi;
- g. pelaksanaan pemantauan, dan mengevaluasi pelaporan program pelayanan dan rehabilitasi sosial; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 5

#### Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

#### Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PSBAWEP Harapan Mulya.



- (2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar/anak putus sekolah tidak mampu, wanita penyandang PMKS dan eks psikotik.

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemanggilan, registrasi dan penyimpanan file klien;
- b. pelaksanaan asesmen;
- c. pelaksanaan observasi lanjutan;
- d. pelaksanaan pemeliharaan jasmani yang meliputi sandang, pangan alat bantu dan kesehatan klien;
- e. pelaksanaan pengasuhan dan perawatan;
- f. pelaksanaan bimbingan mental, sosial, fisik dan keterampilan;
- g. pelaksanaan pemulangan;
- h. pelaksanaan bimbingan lanjut; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 6

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD PSBAWEP Harapan Mulya.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

### TATA KERJA

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala UPTD PSBAWEP Harapan Mulya, kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.



- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### BAB IV PENGISIAN JABATAN

##### Pasal 16

- (1) Kepala UPTD PSBAWEP Harapan Mulya, kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD PSBAWEP Harapan Mulya diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada UPTD PSBAWEP Harapan Mulya wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada UPTD PSBAWEP Harapan Mulya harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB V JABATAN UPTD

### Pasal 17

- (1) Kepala UPTD PSBAWEP Harapan Mulya merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 18

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD PSBAWEP Harapan Mulya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 19

Dalam rangka pemenuhan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap kelembagaan UPTD PSBAWEP Harapan Mulya akan dilakukan evaluasi secara rutin.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 20

Pejabat UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. ketentuan Pasal 2 angka 6 huruf c, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 01); dan
- b. ketentuan Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 26);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



## Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 16 - 03 - 2018

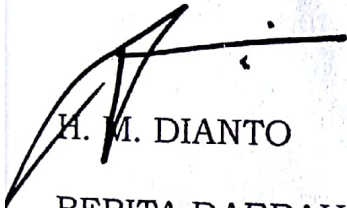
GUBERNUR JAMBI



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 22 - 03 - 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,



H. M. DIANTO

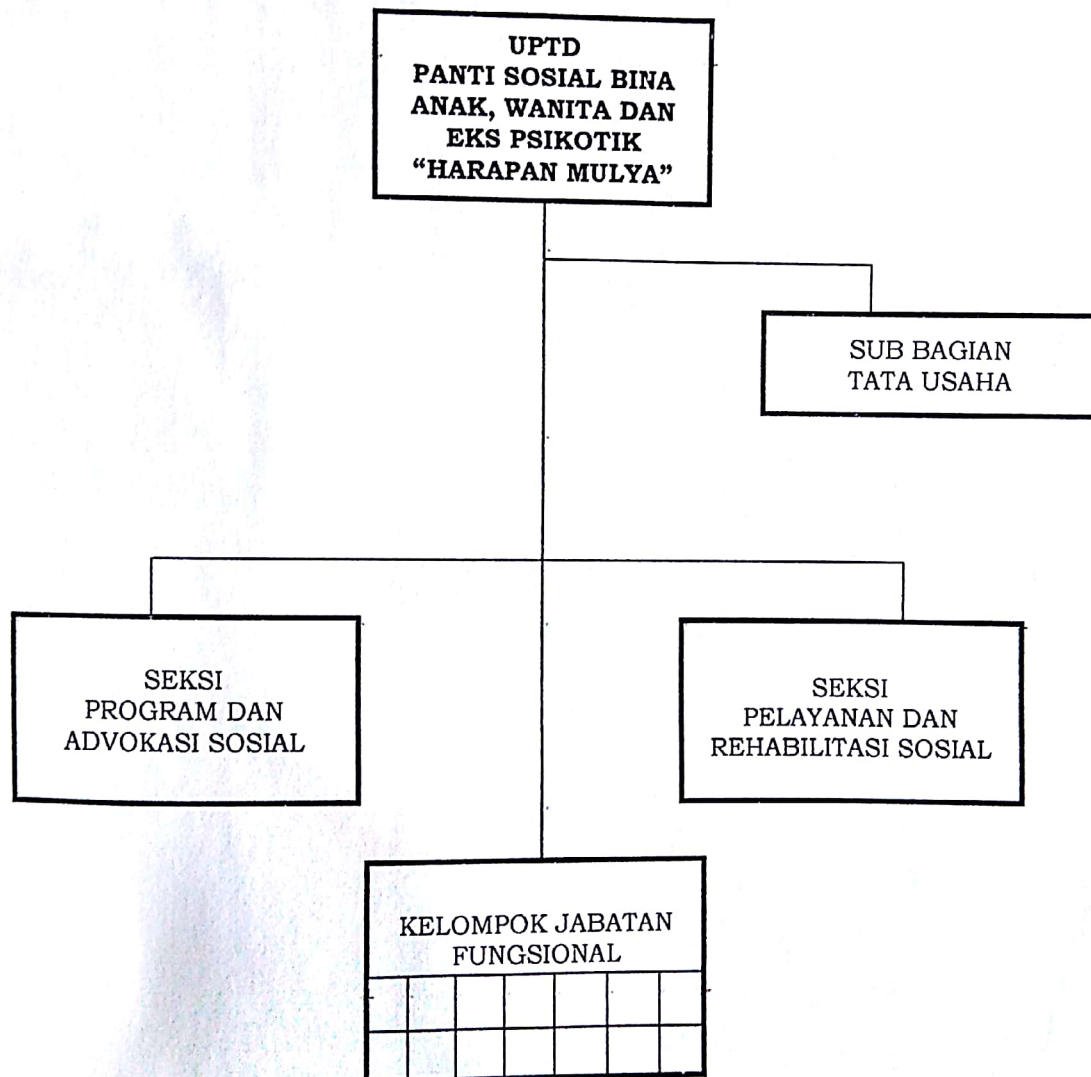
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 13



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PANTI SOSIAL BINA ANAK, WANITA  
DAN EKS PSIKOTIK "HARAPAN MULYA" PADA  
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI UPTD  
PANTI SOSIAL BINA ANAK, WANITA DAN EKS PSIKOTIK  
"HARAPAN MULYA"



GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI